

**PANDUAN PELAKSANAAN*)
PENDIDIKAN BERWAWASAN KEBANGSAAN
DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**) Diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional (2009). Terimakasih atas kontribusi yang sangat berarti kepada: Dr. H. Suyitno, M.Pd, Dra. Yusi Riksa Yustiana, M.Pd, Drs. Sudaryat NA, dan Dadang Sudrajat, S.Pd., M.Pd.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai komunitas etnik, agama, bahasa daerah, dan adat-istiadat. Keragaman ini merupakan anugerah Tuhan yang harus menjadi kebanggaan semua warga, patut disyukuri, dan dipelihara karena dapat menjadi faktor yang mendinamiskan Bangsa Indonesia sebagai bangsa beradab dan bermartabat. Sehubungan dengan hal itu, maka setiap warga dituntut untuk saling mengenal, menerima, menghargai, dan saling membantu dalam rangka memelihara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Setelah setengah abad lebih mengikat diri menjadi satu Bangsa Indonesia, kini rasa persatuan dan kesatuan bangsa mengalami gejala disintegrasi yang cukup memprihatinkan. Semula, hal itu dipicu oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan yang kemudian meluas menjadi krisis multidimensi, dan berakhir pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum. Sekalipun kecenderungan ini merupakan gejala yang wajar dari suatu masyarakat yang tengah mengalami masa transisi dari sistem pemerintahan yang otoritarian menuju demokratis, tetapi gejala yang muncul cenderung bersifat eksplosif, merebak dengan cepat di kalangan masyarakat dan hampir tidak dapat dikendalikan oleh pihak yang berwenang. Gejala ini telah mengakibatkan berbagai bentuk pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang cukup parah serta merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Gejala disintegrasi tersebut diperparah dengan pemahaman yang tidak tepat (*misunderstanding*) pada sebagian masyarakat tentang hakikat reformasi, kebijakan otonomi daerah, dan semangat demokrasi. Reformasi cenderung diartikan sebagai gerakan massa untuk mengubah keadaan secara cepat atau menjatuhkan kedudukan seseorang dalam suatu unit organisasi. Kebijakan otonomi daerah cenderung diartikan sebagai penguasaan atas jabatan dan aset-aset di daerah yang bernilai ekonomi hanya oleh putra asli daerah. Sementara itu, demokrasi diartikan sebagai kebebasan tanpa batas untuk memaksakan kehendak sekelompok orang. Sebagai salah satu akibatnya, maka tumbuhlah gejala primordialisme dan separatisme, di

mana setiap daerah cenderung mengutamakan kepentingan masing-masing dan saling menonjolkan sifat kedaerahan secara sempit, berkembangnya sentimen negatif antardaerah dan antar etnis, rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia mulai luntur, bahkan beberapa daerah bersikeras ingin memisahkan diri dari wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Dasar 1945 dan Amandemen
2. Ketetapan MPR No. TAP/XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia
3. Undang-undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7. UU RI No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tanggal 16 September 1998 tentang Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi, dan Perlakuan Layanan yang Sama kepada Semua Warga Negara.
9. Permendiknas no. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
10. Surat Keputusan Dirjen Pothan Dephan Nomor: Skep/56/XII/2004 tanggal 2 Desember 2004 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
11. Pasal 4, 36 dan 37 Piagam Hak Asasi Manusia, Pasal 37: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai mitra di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable*).

C. Pengertian Pendidikan Berwawasan Kebangsaan

Pengertian pendidikan berwawasan kebangsaan dapat ditinjau secara konsepsional dan operasional. Secara konsepsional pendidikan berwawasan kebangsaan mencakup pengertian sebagai berikut.

1. Upaya sistematis dan kontinu yang diselenggarakan oleh sekolah untuk menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam peranannya pada saat sekarang dan masa yang akan datang.
2. Upaya pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan pemahaman, sikap dan tingkah laku siswa yang menonjolkan persaudaraan, penghargaan positif, cinta damai, demokrasi dan keterbukaan yang wajar dalam berinteraksi sosial dengan sesama warga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan sesama warga dunia.
3. Keseluruhan upaya pendidikan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab melalui upaya bimbingan, pengajaran, pembiasaan, keteladanan dan latihan sehingga dapat menjalankan peranannya pada saat sekarang dan masa yang akan datang.

Secara operasional, pendidikan berwawasan kebangsaan adalah layanan bimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan untuk meningkatkan paham, rasa, dan semangat kebangsaan yang baik pada siswa, yang ditunjukkan dengan mengutamakan tingkah laku bersaudara, demokratis, saling menerima dan menghargai, serta saling menolong dalam berinteraksi sosial dengan sesama warga Indonesia.

D. Tujuan dan Fungsi

1. Tujuan

Pendidikan berwawasan kebangsaan ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan pengertian, pemahaman dan persepsi yang tepat tentang persatuan dan kesatuan antar sesama warga NKRI.
- b. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai penerus Bangsa Indonesia.
- c. Mengembangkan kepekaan sosial, solidaritas, toleransi dan saling mengenal serta saling menolong antar sesama warga NKRI walaupun berbeda latar belakang.
- d. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam mengelola konflik antar-pribadi dan atau antar-kelompok.

2. Fungsi

Dalam pendidikan berwawasan kebangsaan tercakup fungsi *pengenalan*, *peningkatan*, *pemupukan*, *pengembangan*, dan *pencegahan*.

- a. *Pengenalan*, yaitu memperkenalkan berbagai komunitas etnis di Indonesia dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya.
- b. *Peningkatan*, yaitu untuk meningkatkan pemahaman, rasa dan semangat berbangsa dalam NKRI.
- c. *Pemupukan*, yaitu untuk menumbuh-suburkan nilai-nilai kemanusiaan perdamaian dan demokrasi kepada siswa SMP dalam berinteraksi sosial dengan sesama warga negara dan sesama warga dunia.
- d. *Pengembangan*, yaitu mengembangkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam mengelola konflik sosial.
- e. *Pencegahan*, yaitu mencegah terjadinya tawuran di kalangan siswa SMP, konflik antar-pribadi dan atau konflik antar-kelompok.

BAB II KONSEP DAN STRATEGI

A. Konsep dan Indikator

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa yang berkaitan dengan cita-cita yang akan memberikan arah dan gairah hidup serta tujuan yang ingin dicapainya. Dalam konteks Indonesia, cara pandang bangsa Indonesia didasarkan pada ideologi Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945.

Konsep wawasan kebangsaan dalam pedoman ini mengacu kepada tiga hal, yaitu paham kebangsaan, rasa kebangsaan, dan semangat kebangsaan.

Pertama, **paham kebangsaan** berorientasi pada cara berpikir, yang secara operasional merujuk kepada nilai-nilai dan norma kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dilandasi oleh pemahaman yang mendalam akan pandangan hidup, latar belakang sejarah, kondisi geografis, kesenian dan bahasa. Aspek-aspeknya ditekankan pada hak-hak asasi manusia dan moral dasar negara modern dalam berbangsa, yang meliputi dimensi: kebenaran, kesamaan dan keadilan, kedamaian, kesetiakawanan,

penghormatan kepada manusia, integritas, akuntabilitas, kejujuran, penerimaan/penghargaan kebhinekaan, kebebasan dan tanggung jawab.

Kedua, **rasa kebangsaan** berorientasi pada sikap yang ditanamkan melalui kebiasaan merespon terhadap kejadian atau peristiwa yang terkait pada kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di antaranya, yaitu: penerimaan dan penghargaan atas perbedaan-perbedaan keadaan diri, asal usul keturunan, dan suku bangsa yang mengekspresikan sebagai bangsa Indonesia. Aspek-aspeknya menekankan pada nilai perdamaian, patriotisme dan nasionalisme yang di dalamnya meliputi: cinta, keharuan atau rasa iba, harmonis, toleransi, nilai simbolik persatuan dan kesatuan bangsa (bendera merah putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Lagu Indonesia Raya), peduli dan berbagi, interdependensi, pengenalan jiwa orang lain, dan rasa berterima kasih.

Ketiga, **semangat kebangsaan** berorientasi pada perilaku yang merujuk kepada dinamika perilaku yang atraktif dalam perbuatan senasib dan sepenanggungan, tenggang rasa, saling menghormati, sanggup berkompetisi secara sehat dan menunjukkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Aspek-aspeknya menekankan pada nilai demokrasi yang di dalamnya meliputi penghormatan pada hukum, kebebasan yang bertanggung jawab, persamaan, disiplin diri, kewarganegaraan yang aktif dan bertanggung jawab, keterbukaan, berfikir kritis, dan solidaritas.

Deskripsi aspek, dimensi, indikator serta keterkaitannya secara rinci dikemukakan pada Tabel 1 berikut.

TABEL 1
ASPEK, DIMENSI, DAN INDIKATOR
WAWASAN KEBANGSAAN

Aspek	Dimensi	Indikator
A. Paham Kebangsaan	1.1 Kebenaran	1.1.1. Kebebasan bicara dan berekspresi 1.1.2. Keyakinan dan beribadat

	1.2 Kesamaan dan keadilan	1.2.1. Kesamaan dalam hukum 1.2.2. Keadilan
	1.3 Penghormatan pada martabat	1.3.1. Menghormati martabat manusia secara wajar 1.3.2. Mengayomi serta menghargai karya orang lain
	1.4 Integritas	1.4.1. tanggung jawab moral 1.4.2. Tingkah laku etis
	1.5 Akuntabilitas	1.5.1. Tanggung jawab pribadi 1.5.2. Menerima risiko tindakan
	1.6 Kejujuran	1.6.1. Jujur 1.6.2. Konsisten antara perkataan dengan perbuatan
	1.7 Menerima dan menghargai kebhinnekaan	1.7.1. Hormat terhadap minoritas/Kelompok kurang beruntung 1.7.2. Menerima menghargai perbedaan
	1.8 Kebebasan yang bertanggung jawab	1.8.1. Menciptakan suasana bebas dari perasaan takut untuk mengungkapkan gagasan 1.8.2 Tanggung jawab terhadap orang lain
	1.9 Kerjasama	1.9.1. Kesiapan bekerja sama 1.9.2. Melatih kerjasama positif dengan siapapun

B. Rasa Kebangsaan	2.1 Cinta-kasih	2.1.1. Sopan santun dalam berperilaku 2.1.2. Setia dan rela berkorban demi perdamaian
	2.2 Keharuan/rasa iba	2.2.1. Memberi dukungan dan pengayoman 2.2.2. Peka atas kebutuhan orang lain
	2.3 Harmoni	2.3.1. Saling percaya dan memahami 2.3.2. Mengutamakan konsensus
	2.4 Toleransi	2.4.1. Menghormati perbedaan pribadi & budaya 2.4.2 Menerima kemajemukan
	2.5 Peduli dan berbagi	2.5.1. Peduli 2.5.2. Murah hati
	2.6 Interdependensi	2.6.1. Saling berhubungan dengan orang-orang 2.6.2. Partisipasi aktif
	2.7 Pengenalan jiwa orang lain	2.7.1. Keyakinan atas potensi material dan spiritual 2.7.2. Percaya terhadap semangat manusia
	2.8 Rasa berterima kasih	2.8.1. Penghargaan 2.8.2. Kesiediaan menerima
C. Semangat Kebangsaan	3.1 Penghormatan pada hukum	3.1.1 Menghormati keputusan bersama 3.1.2 Penghormatan kepada yang berwenang

	3.2 Kebebasan yang bertanggung jawab	3.2.1. Kebebasan mengungkapkan maksud dengan jelas 3.2.2. Hidup demokratis yang bertanggung jawab
	3.3 Persamaan	3.3.1. Kepercayaan terhadap martabat manusia 3.3.2. Pengakuan atas hak minoritas /kelompok tak beruntung
	3.4 Pengendalian (disiplin) diri	3.4.1. Sopan dalam berinteraksi dengan sesama manusia 3.4.2. Penyelesaian pertikaian tanpa kekerasan
	3.5 Kewarganegaraan yang aktif	3.5.1. Kesiapan berbuat sukarela 3.5.2. Kesadaran berwarganegara
	3.6 Keterbukaan	3.6.1. Mengutamakan dialog dan konsultasi 3.6.2. Terbuka terhadap kebenaran ilmiah yang universal
	3.7 Berpikir kritis	3.7.1. Memiliki dorongan kuat untuk mengetahui 3.7.2. Menggunakan informasi yang benar sebagai dasar pengambilan keputusan
	3.8 Solidaritas	3.8.1. Mengambil keputusan kolektif 3.8.2. Mengutamakan bekerja dalam tim

B. Strategi dan Pendekatan

Strategi dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan berwawasan kebangsaan, secara garis besar dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu strategi jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Strategi Jangka Panjang dipilih untuk mencapai tujuan pendidikan wawasan kebangsaan yang terkait dengan mempersiapkan siswa dengan berbagai keterampilan yang membuat mereka kompeten untuk mengelola kehidupan masa depan di dalam lingkungan yang berubah cepat. Strategi Jangka Menengah dipilih untuk mencapai tujuan pendidikan wawasan kebangsaan yang terkait dengan berbagai keterampilan yang membuat mereka kompeten untuk mengelola kehidupannya selama mereka menjadi siswa di sekolah. Strategi Jangka Pendek dipilih untuk mencapai tujuan pendidikan wawasan kebangsaan yang terkait dengan berbagai keterampilan yang dapat ditampilkan siswa kapanpun sehingga dapat diukur dengan segera.

Dalam menggunakan strategi-strategi di atas, pertimbangan penting hendaknya merujuk pada pendekatan holistik dan bermuara pada penumbuh-kembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Pada setiap strategi yang dipilih, di dalamnya menerapkan beberapa pendekatan antara lain penanaman dan penjelasan nilai-nilai wawasan kebangsaan, memecahkan dilema-dilema moral, analisis nilai-nilai, belajar bertindak (*learning by doing*), interaksi sosial yang intens, dan model tindakan sosial.

Secara singkat, perkiraan strategi pendidikan untuk setiap materi wawasan kebangsaan adalah sebagai berikut.

1. Strategi Pendidikan Paham Kebangsaan

Untuk mengembangkan paham kebangsaan pada diri siswa, para guru seyogyanya menanamkan paham bahwa manusia lahir dengan hak untuk hidup, hak untuk berbicara dan berekspresi, serta hak untuk menentukan keyakinan. Selain itu, guru perlu membangkitkan kesadaran siswa akan haknya untuk memutuskan tindakannya dan bertanggungjawab atas konsekuensi tindakan tersebut. Di lain sisi, perlu ditanamkan bahwa setiap individu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan guna menjamin hak-hak asasi manusia. Pernyataan tersebut selaras dengan pasal 4 (empat) Piagam Hak Asasi Manusia yang

menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk pengembangan pribadinya, memperoleh dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya”.

Untuk mempelajari paham kebangsaan, lebih khususnya berkenaan dengan hak asasi manusia, dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu belajar tentang hak asasi manusia, belajar bagaimana memperjuangkan hak asasi manusia, dan mempraktikkan hak asasi manusia. Belajar hak asasi manusia dapat dilakukan dengan meningkatkan daya pikir melalui pengkajian atas dokumen tentang hak asasi manusia, juga perlu mengkaji pelanggaran hak asasi manusia melalui studi kasus. Belajar tentang memperjuangkan hak asasi perlu dilakukan melalui perolehan pengetahuan yang relevan disertai dengan praktik secara langsung. Sementara itu, belajar tentang pelaksanaan hak asasi manusia ditanamkan melalui kualitas hubungan pribadi dan metode pembelajaran yang menunjukkan penghormatan terhadap hak siswa beserta guru. Intinya, strategi yang dipandang unggul untuk menanamkan paham kebangsaan adalah pembelajaran melalui indoktrinasi, *problem solving*, dan *VCT (Value Clarification Technic)*. Dalam strategi belajar VCT terdapat berbagai kegiatan belajar melalui kegiatan ceramah dan diskusi, *role playing*, seminar, observasi lapangan dan pemecahan masalah (*problem solving*) dalam kegiatan interaksi sosial pada lingkup sekolah dan masyarakat

2. Strategi Pendidikan Rasa Kebangsaan

Dalam tatanan kegiatan kurikuler di sekolah, pembelajaran rasa kebangsaan sebaiknya dipadukan secara integral melalui lintas bidang studi, seperti Bahasa, Studi Sosial (Sejarah, Ekonomi, Politik, dan Budaya), Sains (Fisika, Kimia, Biologi, dan Matematika), serta pendidikan jasmani dan Seni. Tatanan yang bersifat ko-kurikuler dan ekstrakurikuler antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan: (a) studi di objek sejarah, industri strategis, lembaga-lembaga negara dan (b) praktik bakti sosial yang sasaran utamanya kelompok kurang beruntung atau kegiatan-kegiatan melalui organisasi sosial dan internasional, seperti UNESCO dan UNICEF. Hal yang lebih penting di sini ialah bagaimana mempertajam kepekaan siswa terhadap pentingnya membina perdamaian antarmanusia, penanaman nilai patriotisme dan nasionalisme serta hak dan kewajiban membela negara. Hal ini selaras dengan Piagam Hak Asasi

Manusia pasal (36) yang menyatakan: “Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

3. Strategi Pendidikan Semangat Kebangsaan

Untuk mengembangkan semangat kebangsaan dalam diri siswa, perlu dimulai dari pemberlakuan etos demokrasi oleh guru di tempat pembelajaran. Nuansa pembelajaran sebaiknya memperluas perspektif demokrasi sesuai dengan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik beserta evolusinya. Keragaman yang ada di negara kita seyogyanya dijadikan pijakan untuk proses pembelajaran hidup dalam rangka mengembangkan kekhasan semangat kebangsaan Indonesia. Sangat diharapkan bahwa pendidikan semangat kebangsaan ini menekankan kepada eksistensi lingkungan yang demokratis, baik di dalam maupun di luar kelas. Ini dapat dilakukan dengan praktik pendidikan untuk semua, kohesi sosial, kesetaraan gender, kebebasan yang bertanggungjawab, serta kepedulian atas keseimbangan antara hak dengan kewajiban. Lebih jauh, siswa sebaiknya diberi kesempatan yang luas bukan hanya untuk belajar tentang demokrasi, melainkan mempraktikkan dan menciptakan sendiri lingkungan yang demokratis dalam kehidupannya.

BAB III PENGELOMPOKAN PROGRAM

Program pendidikan berwawasan kebangsaan dapat dikelompokkan berdasarkan: (1) tingkatan wilayah, yang terdiri atas tingkat sekolah, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, wilayah bagian Indonesia, dan nasional; (2) kurikuler, terdiri atas intra kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler; (3) pengorganisasian, terdiri atas formal dan nonformal; dan (4) sasaran, terdiri atas individu-kelompok, pada sekolah dengan katagori RSBI, SSN dan SPM pada tingkat satuan pendidikan SMP/setara.

A. Tingkatan Wilayah

1. Sekolah

Program pada tingkatan sekolah adalah aktivitas yang dapat memfasilitasi peluang/kesempatan bagi para siswa untuk berinteraksi secara luas dengan setiap orang di lingkungan internal sekolah serta memperoleh informasi yang positif dan konstruktif tentang diri dan orang lain. Melalui kegiatan pada tingkatan sekolah siswa diharapkan mampu memandang diri dan orang lain secara positif, proporsional serta belajar bersama dalam keberagaman. Contoh aktivitas yang dapat dilakukan pada tingkatan sekolah, antara lain:

- a. Penerimaan murid baru, terbuka bagi semua etnis/suku bangsa;
- b. Pertandingan antar kelas;
- c. Penataan ruangan dan lingkungan sekolah yang memberi kesempatan pada semua siswa dapat berinteraksi;
- d. Pengembangan fasilitas sekolah untuk semua kelompok bidang studi/ilmu;
- e. Diskusi terbuka/dialog antar siswa tentang perkembangan diri, tuntutan perilaku sebagai pelajar/budaya daerah, budaya Indonesia, nilai-nilai dasar kemanusiaan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia;
- f. Pelatihan pengembangan potensi diri;
- g. Program teman asuh;
- h. Pentas seni;
- i. Penghargaan siswa terbaik yang dikompetisikan setiap minggu;
- j. Kunjungan ke objek bersejarah;
- k. Bakti sosial;
- l. Kunjungan ke lembaga-lembaga negara.

2. Kecamatan

Program pada tingkatan kecamatan merupakan aktivitas yang memfasilitasi siswa mengenal potensi lingkungan disekitar serta berinteraksi dengan masyarakat. Aktivitas diarahkan pada kepedulian pelajar terhadap berbagai permasalahan sosial masyarakat di sekitar sekolah termasuk di dalamnya pengamatan dan penanganan persoalan lingkungan alam sekitar, persoalan sosial dan persoalan pendidikan.

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Bakti pelajar di lingkungan sekitar (desa/kelurahan);
- b. Pentas seni antar sekolah dan antar organisasi pemuda;
- c. Pertandingan olah raga antara sekolah dan antar organisasi pemuda;
- d. Peduli teman pelajar;
- e. Diskusi terbuka dengan tokoh-tokoh masyarakat, institusi/ lembaga formal, tokoh-tokoh pemuda;
- f. Aksi bazaar dan penjualan buku murah;
- g. Cinta lingkungan.

3. Kota/Kabupaten

Program pada tingkatan kota/kabupaten adalah aktivitas yang memberi peluang bagi siswa untuk menunjukkan potensi diri dan sekolah sehingga siswa memiliki pengalaman belajar yang bermakna dari lingkungan. Aktivitas yang dapat digelar antara lain:

- a. Belajar dari sumber-sumber belajar yang ada di lingkungan;
- b. Tanggung jawab pemeliharaan fasilitas umum terdekat dengan sekolah;
- c. Pentas seni dan pertandingan persahabatan antar sekolah dan organisasi pemuda;
- d. Pusat kegiatan/aktivitas pemuda;
- e. Peluang bekerja part timer pada berbagai lingkungan pekerjaan;
- f. Aksi peduli pelajar terhadap sesama pelajar, masyarakat miskin, minoritas dan tersisihkan;
- g. Dialog dan dengar pendapat dengan tokoh masyarakat, anggota DPR, pimpinan daerah tentang perkembangan daerah dan akses pelajar/pemuda dalam pembangunan daerah;
- h. Dialog terbuka antar pelajar pengembangan potensi diri dan akses sumber daya daerah;
- i. Pekan budaya pelajar;
- j. Pemilihan pahlawan/tokoh pelajar bulan ini (perilaku).

4. Provinsi

Program pendidikan berwawasan kebangsaan pada tingkat provinsi adalah aktivitas yang memfasilitasi siswa untuk menunjukkan kebanggaan dan karya sebagai putra daerah. Aktivitas diarahkan pada pengembangan pemahaman posisi diri di daerah dan akses diri terhadap kemajuan daerah. Aktivitas yang dapat digelar antara lain:

- a. Pertukaran pelajar antar daerah;
- b. Perkampungan kerja pelajar;
- c. Aksi peduli pelajar terhadap pembangunan daerah;
- d. Gelar budaya, seni dan olah raga daerah;
- e. Dialog interaktif antar pelajar;
- f. Pengembangan simbol-simbol kedaerahan;
- g. Pemahaman sejarah dan potensi daerah melalui kunjungan kerja pelajar;
- h. Aksi sosial pelajar dalam berbagai masalah sosial kemasyarakatan;
- i. Lomba penulisan pengalaman dan potensi daerah;
- j. Dialog harapan dan keterlibatan pelajar dalam aktivitas kemajuan daerah.

5. Wilayah Bagian Indonesia

Program pendidikan berwawasan kebangsaan pada tingkat wilayah Indonesia bagian barat, tengah dan timur adalah aktivitas yang memberi kesempatan pada pelajar untuk mengenal keberagaman dan potensi pelajar di wilayahnya. Aktivitas diarahkan pada perasaan kebersamaan dalam keberagaman dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai suatu potensi. Aktivitas yang dapat dikembangkan antara lain:

- a. Kapal pelajar;
- b. Pengembangan potensi religius;
- c. Gelar budaya, seni dan olah raga;
- d. Pekan kreativitas pelajar;
- e. Pemilihan pelajar berprestasi, berpotensi dan kreatif;
- f. *Home stay* pelajar antar provinsi;
- g. Dialog interaktif antar provinsi.

6. Nasional

Program pendidikan berwawasan kebangsaan pada tingkat nasional adalah aktivitas yang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.

Aktivitas diarahkan pada pemberian kesempatan menunjukkan posisi diri sebagai bagian dari bangsa dan memahami posisi bangsa bagi diri. Aktivitas yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Kemah kerja pelajar Indonesia;
- b. Kongres pelajar;
- c. Aksi peduli pelajar pada persoalan bangsa;
- d. Lomba penulisan artikel harapan dan pemikiran pelajar tentang Indonesia;
- e. Perwakilan pelajar pada dialog wakil rakyat dengan Depdiknas.

B. Kurikuler

Program pendidikan berwawasan kebangsaan pada tatanan kurikuler dapat dilakukan dalam konteks intra kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Aktivitas intra kurikuler diarahkan pada pemahaman pelajar tentang wawasan kebangsaan yang terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Aktivitas kokurikuler adalah aktivitas yang memfasilitasi pengembangan kesadaran sebagai warga negara dan berperilaku atas dasar nilai-nilai kebangsaan. Aktivitas pada ekstrakurikuler adalah aktivitas yang mendorong siswa untuk mengenal potensi diri dan mengaktualisasikan diri sebagai bagian dari kebanggaan sebagai anak Indonesia. Aktivitas yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut.

1. Intra Kurikuler: mengaitkan konten materi pelajaran dengan potensi wilayah Indonesia, persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dan solusi permasalahan yang dapat dilakukan.
2. Kokurikuler: menciptakan aktivitas yang memfasilitasi peserta didik mampu berperilaku sebagai warga negara yang memiliki karakteristik bangsa Indonesia.

3. Ekstrakurikuler: memfasilitasi semua aktivitas yang menjadi perhatian dan kepedulian siswa, motivasi dan dorongan bagi siswa untuk beraktivitas sebagai pelajar.

C. Pengorganisasian

Berdasarkan struktur pengorganisasiannya, program pendidikan berwawasan kebangsaan dapat dilakukan secara formal, dalam arti melalui berbagai pelatihan dan aktivitas yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah; dan secara non-formal, dalam pengertian mendorong pengembangan budaya dan fungsi keluarga sebagai agen pemeliharaan sistem nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Aktivitas yang dapat dilakukan antara lain:

1. Formal: pelatihan atau penataran, seminar, dialog interaktif pelajar tentang kebangsaan;
2. Nonformal: dialog dan pemanfaatan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas.

D. Sasaran

Sasaran terdiri atas: (1) kategori sekolah (RSBI, SSN, dan SPM); dan (2) Individu/kelompok pada tingkat satuan pendidikan SMP.

Fokus dan tujuan program yang dikembangkan pada setiap kategori sekolah berbeda, sesuai dengan tuntutan kompetensi peserta didik pada jenis sekolah tersebut. Pada sekolah kategori SBI fokus dan tujuan program adalah kemampuan berperilaku sebagai pribadi warganegara dan bangsa Indonesia dalam pergaulan dan aktivitas global internasional. Fokus dan tujuan program pada sekolah dengan kategori SSN adalah kemampuan berperilaku sebagai pribadi dan warga negara yang berbangsa Indonesia. Pada sekolah dengan kategori SPM fokus dan tujuan program adalah kemampuan berperilaku dengan kesadaran pemahaman potensi diri sebagai bagian dari warga negara dan bangsa Indonesia.

Berdasarkan sasarannya, program dapat dikelompokkan ke dalam aktivitas yang membantu para pelajar pada setiap jenis dan tingkatan sekolah untuk mengenal diri sebagai bagian dari bangsa. Pengenalan diri tidak hanya bersifat verbalistik, tetapi keterlibatan pada berbagai aktivitas serta keteladanan dari para pendidik dalam berperilaku berbangsa Indonesia. Penyediaan berbagai fasilitas yang membuat para

pelajar mengenal dan menghargai keragaman sebagai potensi serta belajar hidup dalam keragaman. Aktivitas yang dapat dilakukan antara lain:

1. Penyediaan fasilitas bacaan tentang Indonesia dan berbagai daerah Indonesia;
2. Pengembangan visi kebangsaan bagi kalangan pembembang media baik cetak maupun elektronik;
3. Penyediaan film-film dan cerita tentang keberagaman dan kesatuan bangsa.

BAB IV PENILAIAN KEGIATAN

A. Pengertian Penilaian PBK

Penilaian adalah upaya memperoleh sejumlah informasi yang penting, menyeluruh dan berkesinambungan tentang proses dan hasil bimbingan, pengajaran dan latihan penerapan nilai-nilai pemahaman, rasa dan semangat kebangsaan oleh siswa SMP.

Yang dimaksud dengan penilaian PBK adalah suatu upaya untuk memperoleh informasi tentang perubahan perilaku pada diri siswa, baik yang berhubungan dengan paham, rasa, maupun semangat kebangsaan setelah diselenggarakan program PBK yang mengacu pada tabel 1.

B. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian PBK adalah untuk mengukur, mengetahui, dan memberi balikan kepada siswa dan guru SMP tentang proses dan hasil bimbingan, pengajaran dan atau latihan penerapan nilai-nilai dasar trimatra wawasan kebangsaan oleh siswa dalam interaksi sosial.

C. Fokus Penilaian

Penilaian PBK lebih ditekankan pada keberhasilan penerapan nilai-nilai trimatra wawasan kebangsaan oleh siswa dalam situasi interaksi sosial tertentu, di lingkungan sekitar, di sekolah, dan di masyarakat luas.

D. Bentuk Penilaian

Penilaian dilakukan kepada siswa secara perseorangan maupun terhadap sekelompok siswa tertentu (misalnya kelas, kelompok etnis atau agama).

E. Cara Penilaian

Penilaian PBK di SMP dapat dilakukan oleh semua guru mata pelajaran, guru pembina kesiswaan dan kegiatan ekstrakurikuler. Hasil penilaian diinformasikan secara terkoordinasi kepada guru pembimbing atau wali kelas. Penilaian dilaksanakan pada setiap kegiatan bersama, baik di dalam kelas maupun di luar kelas dengan cara pengamatan dan pencatatan.

F. Instrumen Penilaian

Untuk memperoleh informasi tentang penerapan nilai-nilai trimatra kebangsaan oleh siswa, perlu disiapkan instrumen penilaian yang relevan dengan situasi interaksi sosial yang akan diamati. Instrumen penilaian dapat berupa: (1) pedoman observasi, (2) pedoman wawancara, (3) format skala sikap, (4) *check-list*, (5) format portofolio, (6) laporan peristiwa sosial. Dalam hal ini guru perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan penilaian pendidikan pada umumnya dan PBK pada khususnya.

G. Tindak Lanjut

Hasil penilaian dari kegiatan PBK dapat ditindak lanjuti oleh guru pembimbing dan wali kelas dalam bentuk laporan secara tertulis yang menggambarkan ketercapaian tujuan PBK. Apabila tujuan PBK belum tercapai oleh siswa maka selanjutnya siswa direkomendasikan untuk mendapat perhatian layanan kegiatan lain.

Berdasarkan trimatra PBK, paham, rasa dan semangat kebangsaan, maka penilaian dapat dilakukan dalam bentuk evaluasi diri mengingat penekanan PBK terletak pada pengalaman dan pengamalan

BAB V PENUTUP

Program pendidikan berwawasan kebangsaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, yang diarahkan pada pembentukan peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Pelaksanaannya di

sekolah dapat melalui upaya bimbingan, pembelajaran, pembiasaan, keteladanan dan latihan, sehingga peserta didik dapat menjalankan peranannya pada saat sekarang dan masa yang akan datang.

Pelaksanaan program pendidikan berwawasan kebangsaan di sekolah adalah strategi pendidikan yang sangat fundamental, terutama dalam kerangka mengembangkan kecakapan hidup yang harmonis dalam keberagaman melalui belajar hidup bersama orang lain yang berbeda-beda.

